

SAYA BERMIMPI JADI HABIBIE BARU

Visi Saya

tentang

Kemajuan Pendidikan di Indonesia

Oleh :

Evelyna Stephanie

SMA PAX PATRIAE

BEKASI

BIO DATA

Nama Lengkap : Evelyn Stephanie
Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 12 September 1991
Pendidikan : Kelas XI IPS
Sekolah : SMA Pax Patriae
Alamat Sekolah : Jl. Gardenia Raya Blok BA 2 no. 41 – Villa Galaxy
Bekasi Selatan 17147
Telp. : 021 – 82413795
Nama Orang Tua : Fransisca Utari
Alamat Rumah : Taman Cikunir Indah, Jl. Nusantara 6 Blok A1/2
Rt 06/11 Bekasi Selatan 17146
Telp. : 021-91685867
HP : 021-91685867

Bekasi, 21 November 2007

Mengetahui,

Kepala SMA Pax Patriae,

Dra. Tan Yulie Yuliana, M.Si.

Saya bermimpi jadi Habibie baru :

Saya bermimpi ingin bersekolah dengan biaya terjangkau, kualitas terjamin dan bebas dari tindak kekerasan (*bullying*). Tapi apakah mimpi itu bisa menjadi kenyataan sehingga kami, para siswa tidak merasa *minder* dan dapat duduk sederajat dengan para siswa asing di JIS (Jakarta International School)? Apakah tidak ada upaya Pemerintah (Depdiknas) untuk mengejar ketertinggalan kita dalam dunia pendidikan atau kita akan menutupinya secara semu dengan terus membangun Sekolah *National Plus* dan SBI (sekolah bertaraf internasional) yang tak mampu bersaing dengan JIS?

Para guru saya berkilah, Pemerintah (Depdiknas) sudah berusaha keras untuk mengejar keterpurukan dunia pendidikan kita melalui peluncuran kurikulum baru (KTSP) yang dikukuhkan dengan Peraturan Mendiknas (Permen) yang katanya bertujuan untuk mendorong kemajuan dunia pendidikan kita. Saya kutipkan dasar pernyataan para guru saya itu sebagai berikut :

Permen no. 22 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 : *Standar isi untuk Satuan pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Standar Isi mencakup **lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal** untuk mencapai **kompetensi lulusan minimal** pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.* (Jadi, guru dan sekolah harus mampu membuat lingkup materi maksimal dan tingkat kompetensi maksimal untuk mencapai kompetensi lulusan maksimal yang dapat diterima di Perguruan Tinggi papan atas). Ketentuan ini sejalan dengan Permen no. 24 tahun 2006 pasal 1 ayat 2 : *Satuan Pendidikan **dapat mengembangkan kurikulum dengan STANDAR YANG LEBIH TINGGI** dari standar isi sebagaimana diatur dalam Permen no. 22 dan standar kompetensi lulusan sebagaimana diatur dalam Permen no. 23 tahun 2006*

Lalu apa yang salah bila ternyata dunia pendidikan kita tetap jalan ditempat? UAN (ujian akhir nasional) tetap ditakuti para siswa maupun guru, dan *bullying* makin menjadi *trend* dimana-mana. Nampaknya ada ketidak sinkronan antara peluncuran kurikulum baru (KTSP) dan pelaksanaan di lapangan. Ada kesalahpahaman yang tak terjembatani antara Permen, KTSP yang dibuat oleh para guru dan implementasi di sekolah dalam kegiatan belajar-mengajar sehari-hari. Kesalahpahaman yang umum terjadi (menurut pengamatan saya) tersebar merata diseperti pelaksanaan kurikulum baru (KTSP) adalah :

(1) diterapkannya **libur pada hari Sabtu** (meskipun guru-guru selalu mengeluh kekurangan waktu untuk menyelesaikan seluruh agenda yang tercantum dalam Standar Kompetensi sehingga bisnis bimbel (bimbingan belajar) makin menjamur) sampai **penjualan silabus** yang

marak di toko-toko buku (padahal seharusnya silabus dibuat sendiri oleh guru setelah menyelesaikan langkah ke 12 dalam penyusunan KTSP oleh guru yang bersangkutan itu sendiri),

(2) **masih diberlakukannya sistem *ranking*** (padahal penilaian harus mencakup aspek holistik : kognitif, psikomotorik, afektif dan kecakapan hidup (*life skill*) - (IQ dan EQ/EI) yang tidak mungkin mampu ditunjukkan *performace*-nya secara prima oleh seorang siswa/beberapa siswa saja – sebarannya pasti merata). Siswa yang pandai dalam bidang matematika belum tentu pandai dalam bidang musik. Lalu untuk apa sistim rangking itu masih diterapkan?

(3) masih adanya penghakiman untuk kemampuan belajar siswa (**masih ada siswa yang tidak naik kelas**) – lalu untuk apa program perbaikan (remedial) diselenggarakan dan untuk apa guru harus mengubah strategi pembelajaran pada langkah ke 6 dari penyusunan KTSP bila siswa gagal memenuhi *passing grade*= SKBM (standar kompetensi belajar minimal)/KKM (kriteria ketuntasan minimal)

(4) ada **guru yang masih aktif memberikan ceramah** (padahal model pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran harus sudah dirumuskan dalam taksonomi Bloom – langkah ke 4 dalam penyusunan KTSP) Ceramah, *jadul* ah!

(5) **kesalah-kaprahan fungsi BK** sebagai tempat penyaluran siswa bermasalah, bukan sebagai tempat siswa untuk merencanakan studi lanjut dan menyiapkan diri untuk bekerja bila tak bisa studi lanjut melalui pendalaman materi pada kecakapan hidup (*life skill*).

(6) **Bahkan yang paling fatal adalah munculnya pemahaman bahwa KTSP itu adalah mainan Menteri baru** (ganti Menteri ganti kurikulum), tanpa melihat bahwa KTSP terdiri dari dua dokumen : **Dokumen I** tentang Isi Pendidikan dan **Dokumen II** tentang Kurikulum, Proses Pembelajaran dan Evaluasi, Sarana dan Prasarana Sekolah dan Buku Ajar. KTSP juga tidak berdiri sendiri, karena KTSP juga menuntut kompetensi guru yang diejawantahkan dalam Program Sertifikasi Guru, sehingga kualitas guru dapat terpantau (tidak semua orang yang tidak laku di pasar kerja dapat menjadi guru).

Mengapa saya tak mungkin jadi Habibie baru?

Disamping ketidak sinkronan di atas, masih ada kendala lain yang menyebabkan kami, para siswa sulit berkembang, yaitu pihak sekolah hanya menjalankan kurikulum baru (KTSP) tanpa menjalankan kelengkapannya. Hasilnya siswa merasa menjadi ”kelinci percobaan” dari proses gonta-ganti kurikulum.

Apa kelengkapan mutlak dari KTSP? Pembinaan manajemen sekolah. Pemerintah sudah mensosialisasikan MBS (manajemen berbasis sekolah) bersamaan dengan dicanangkannya kurikulum 1994, namun gaungnya tertutup hiruk pikuknya proyek penataran kurikulum 1994 ini. Sebagai langkah lanjut, Pemerintah juga mensosialisaikan tipe Sekolah Mandiri bersamaan dengan diluncurkannya kurikulum 2004 (KBK). Namun banyak pihak lebih terpaku pada kurikulum baru ini dan mengabaikan pembinaan manajemen sekolah dan audit kinerja sekolah sehingga upaya untuk menuju ke Sekolah Mandiri terlewatkan.

Sekali lagi Pemerintah mencoba mengingatkan pihak sekolah untuk segera membenahi manajemen sekolah melalui Peraturan Mendiknas (Permen) No. 19 tahun 2007 bulan Mei 2007 tentang MBS (manajemen berbasis sekolah). MBS ini terdiri dari 3 (tiga) dokumen yaitu :

- Dokumen I tentang 5 bidang yang harus dibenahi dalam upaya meningkatkan mutu manajemen persekolahan yang dilengkapi dengan rincian tugas yang harus diemban oleh guru penanggung jawab tiap bidang
- Dokumen II tentang penilaian proses dan evaluasi capaian tugas yang diemban sehingga kinerja sekolah dapat dirumuskan dengan baik
- Dokumen III tentang audit kinerja sekolah dan audit kinerja tenaga kependidikan

Jadi ada tiga jalan untuk memperbaiki kinerja sekolah dan memacu sekolah-sekolah kita agar tidak tetap *adem ayem* dan impian saya untuk menjadi Habibie baru dapat terwujud, yaitu :

1. Menerapkan Permen No. 22, No. 23 dan No. 24 tahun 2006 tentang KTSP secara benar serta melengkapinya dengan Permen No. 19 tahun 2007 tentang MBS dengan sasaran meraih sertifikat ISO 9000. Bagaimana caranya? Pihak Yayasan/Komite Sekolah harus membuat laman (*website*) sekolah yang bersifat inter aktif dan memuat data guru, silabus serta PBK (penilaian berbasis kelas) seperti yang termaktub dalam PP no. 19 tahun 2005. Bila Yayasan/Komite Sekolah kurang mampu mengusahakan laman yang membutuhkan *bandwidth* yang besar dan secara akademik memenuhi kriteria sekolah *on-line*, maka Yayasan/Komite Sekolah dapat bergabung dengan *Oracle Education Foundation* untuk mengisi laman *Think.com* (laman komunitas pembelajaran inter aktif internasional dimana para guru, siswa dan orang tua dapat saling berinter aksi dengan komunitas pendidikan lain di seluruh dunia secara *on-line*) yang *training*-nya gratis dan penyediaan *data base*-nya tak terbatas.
2. Menjajaki langkah-langkah untuk memulai penerapan SKS (sistim kredit semester), sebab dengan persiapan menuju ke SKS, pihak Yayasan/Komite Sekolah dan sekolah dipaksa untuk memperbaiki manajemen persekolahan menuju pada penerapan *moving*

class dan MBS. Dengan demikian, secara prinsipil, cara pandang dan pola pikir (*mindset*) semua *stakeholders* akan berubah, dari menilai/menghakimi siswa (*transformatif, generatif dan transmission*) menjadi menghargai proses sekecil apapun partisipasi yang ditunjukkan oleh siswa (*kognitivisme, behaviorisme dan konstruktivisme*).

3. Mengadopsi kurikulum internasional seperti IB, Cambridge, GAC dll, sebab dengan diterapkannya kurikulum internasional ini, maka pola manajemennya juga harus disesuaikan dengan tuntutan pemerolehan akreditasinya yang mengacu pada pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik, bukan sekedar pengajaran yang bermutu.

Lalu bagaimana bila Yayasan/Komite Sekolah atau sekolah tidak berminat untuk meraih sertifikat ISO 9000?

Ada dua jalan yaitu :

- mengadopsi pola sekolah alternatif seperti TK Kepompong di Kemang Jakarta Selatan, SD Mangunan di Yogya (yang dirintis oleh alm Mangunwijaya Pr) dan mengembangkannya sampai ke tingkat SMP dan SMA, atau Sekolah Citra Berkas di Surabaya yang telah menyatukan pencapaian kualitas, pendidikan budi pekerti dan penerapan disiplin yang membudaya dalam satu tarikan nafas.
- membangun sekolah komunitas seperti yang disyaratkan dalam RUU BHP (Rancangan Undang-undang Badan Hukum Pendidikan) dimana semua *stakeholders* berperan serta dalam menentukan kemajuan dan mutu pendidikan dan pengajaran di sekolah (peran Yayasan menjadi minimalis), sehingga guru dapat bebas berkreasi dan berinteraksi dengan siswa dan orang tua serta masyarakat.

Apapun jalan yang dipilih, sekolah-sekolah kita tidak boleh berhenti melangkah atau arus penutupan sekolah-sekolah Inpres yang sudah terjadi di desa-desa akan merambah juga ke sekolah-sekolah swasta/negeri yang selama ini dinilai bisa *survive*, kalah bersaing dengan sekolah-sekolah internasional yang makin menjamur di tanah air. (Harap diingat, menurut klausul WTO bahwa sektor pendidikan di Indonesia termasuk sektor yang terbuka untuk modal asing)

Lalu apakah saya masih bisa bermimpi untuk jadi Habibie baru ?

Bisa saja, asal menurut saya, kita bisa merevitalisasi dunia pendidikan kita, yang sekarang ini nampak kehilangan pedoman dan arah.

Banyak orang tua dahulu menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah favorit, karena tiga hal : kualitas, pendidikan budi pekerti dan disiplinnya. Maka revitalisasi pendidikan kita harus menyentuh ketiga aspek itu.

(1) **Kualitas.** Bagaimana kualitas bisa terjaga bila orang yang melamar menjadi guru terus menerus menurun mutunya baik secara akademik maupun secara psikologis? Apa tolok ukurnya? Kebingungan guru-guru muda menghadapi soal-soal Olimpiade Sains. Dengan kata lain, penguasaan materi para guru sangat rendah. Itu sebabnya program *enrichment* (pengayaan) tidak pernah berjalan di sekolah-sekolah kita. Siswa yang pandai tidak bisa loncat kelas (tidak ada kelas akselerasi di sistim persekolah kita). Lalu bagaimana jalan keluarnya? Pihak Yayasan/Komite Sekolah harus sungguh-sungguh menyiapkan terbentuknya Litbang yang secara khusus berupaya agar setiap guru dapat mengembangkan dirinya. Merit sistem harus diterapkan. Penjenjangan karier guru harus mulai dirumuskan, mulai dari guru muda (asisten guru/guru bantu), guru madya sampai guru koordinator/guru senior dengan kriteria kenaikan pangkat yang jelas – tidak boleh lagi diterapkan sistem penggajian PGPS (pinter goblok penghasilan sama).

(2) **Pendidikan budi pekerti.** Pendidikan Agama bukan pendidikan budi pekerti. Bekal pendidikan Agama yang cenderung bersifat kognitif dan hafalan telah menghancurkan nilai-nilai humaniora itu sendiri. Lalu mesti bagaimana? Pendidikan nilai harus dirumuskan secara operasional – sudah banyak metode di Fak. Psikologi yang dapat diadopsi untuk membuat pendidikan nilai itu operasional, terpantau dan terukur. Bapak Fidelis Waruwu dari Fak. Psikologi Untar beberapa kali mengulasnya dalam Majalah HIDUP. Sekolah Citra Berkas di Surabaya beberapa kali telah melakukan presentasi *Character Building* yang diajarkan di sekolahnya

(3) **Disiplin.** Disiplin bukan hanya pada ketepatan waktu kedatangan (guru sama sekali tidak boleh terlambat karena dia adalah teladan bagi siswa) tetapi juga cepat mengoreksi ulangan dan cepat mengembalikannya ke siswa, tepat dalam menganalisis soal (masih sering terjadi, soal-soal yang diberikan hanya *copy paste* dari buku-buku soal yang banyak dijual di pasaran dan kemudian setelah diujikan, tak pernah dianalisis) dan mempunyai target yang jelas dalam perbaikan (remedial) dan pengayaan (*enrichment*). Lalu bagaimana kalau kita kedodoran dalam administrasi pengajaran? Merevitalisasi peran Komite Sekolah dan memfungsikan secara jelas peran supervisi dalam kehidupan persekolahan. Yang berhak melakukan supervisi guru bukan hanya Kepala Sekolah dan Yayasan, tetapi juga Komite Sekolah. Dengan demikian, guru akan terpolo untuk berdisiplin karena seluruh *stakeholders* memantau dan menilainya.

Apa yang harus dilakukan supaya mimpi saya menjadi Habibie baru bisa menjadi kenyataan?

Penerapan SKS. Penerapan SKS ini akan membuat guru dan siswa mandiri dalam proses pembelajaran sehingga siswa dapat merencanakan sendiri studinya dan hal itu akan membuat kehidupan persekolahan menjadi dinamis serta menjadikan kegiatan belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan, tak lagi menjadi beban bagi para siswa. Tak ada lagi kegiatan les dan bimbel (bimbingan belajar). Hasilnya :

- (1) Kita mengarah pada penerapan *long life education*
- (2) Kita menghargai prestasi seseorang bukan orangnya (kita menghargai ketekunan dan capaian seseorang). Kita akan belajar mendengar apa yang dikatakan seseorang bukan siapa yang mengatakannya.

Dalam penerapan SKS ini, kita sedang merenda bangsa ini menjadi bangsa pembelajar dan bangsa pekerja keras yang menghargai merit sistem sejak dini